



ERLENI, SH

NOTARIS/PPAT

S.K. MENKEH DAN HAM R.I No. C-1252.HT.03.01-Th.2002, Tanggal 21-10-2002 DAN S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL No. 3-X.A-2005, Tanggal 11-2-2005



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN AL - FAJAR SEI MENCIRIM

1. -Tn. TURUT 2. -Tn. HARI SUSANTO

5. - Ly. NAHING SARTIKA, SE

4. -IIY. RUSHAYANI

5. -Tn. RUSLI, Drs

NOMOR

12-7-2013 .-

= 16 =

TANGGAL

KANTOR

Jl. Sei Mencirim No. 12-A Kp. Lalang Kabupaten Deli Serdang Telepon: (061) 8447121

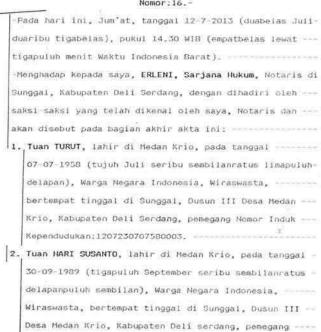
KANTOR NOTARIS ERLENI, S.H.



AKTA PENDIRIAN

YAYASAN PENDIDIKAN AL FAJAR SEI MENCIRIM

Nomor: 16. -



- Nomor Induk Kependudukan:0201123009890011. 3. Nyonya NANING SARTIKA, Sarjana Ekonomi, lahir di ----Medan Krio, pada tanggal 08-06-1984 (delapan Juni ---seribu sembilanratus delapanpuluh empat), Warga Negara Indonesia, Perangkat Desa, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Jalan Bengawan Desa Medan Krio. --Kabupaten Deli Serdang, Kecamatan Medan, pemegang Nomor Induk Kependudukan :1207234806840009.
- 4. Nyonya RUSMAYANI, lahir di Medan Krio, pada tanggal --





12-05-1980 (duabelas Mei

12-05-1980 (duabelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga'Negara Indonesia, Mengurus Rumah Tangga,
bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan -Krio, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk --Kependudukan:1207235205800007.

Tuan RUSLI, Doktorandus, lahir di Sei Mencirim, pada tanggal 17-08-1966 (tujuhbelas Agustus seribu sembilan
ratus enampuluh enam), Warga Negara Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun II Jalan Jati Desa
Sei Mencirim, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk Kependudukan:1207231706660004.

Para penghadap telah saya, Motaris, kenal.

Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang -tunai sebesar Rp.15.000.000,- (limabelas juta rupiah), -Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan
perundang undangan yang berlaku serta dengan ijin dari -pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat -dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan anggaran
dasar sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

(1) Yayasan ini bernama YAYASAN PENDIDIKAN AL FAJAR SEI -

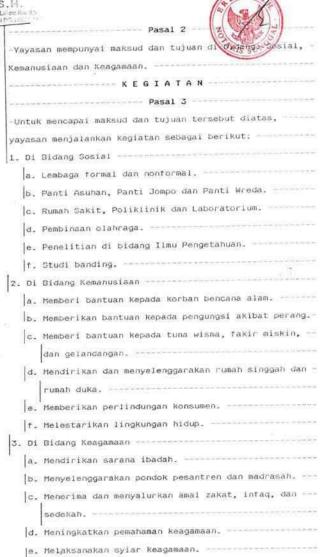
--- Pasal 1 -----

MENCIRIM (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukupdisingkat dengan YAYASAN), berkedudukan di Kabupaten Deli Serdang, kecamatan Sunggal, Desa Sei Mencirim.

(2) Yayasan dapat membuka Kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah --Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus --dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN -----

KANTOR ROTANIS
ERLENI, S.H.
JR. Sel Menchini No. 12-A Ko. Lei mick
Telp. (061) 8447121 KASUFATEN D. 1.



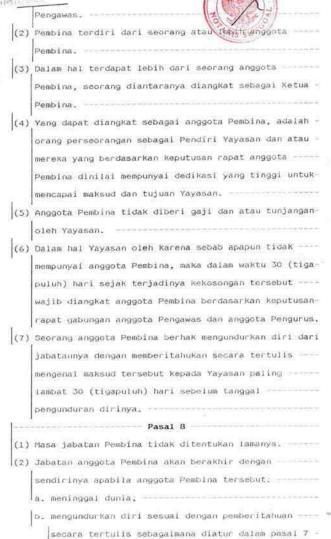




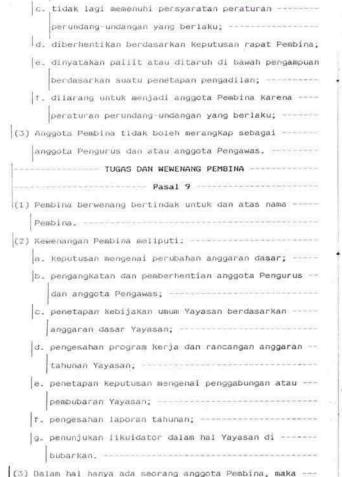
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau

f. Studi banding keagamaan.

ERLENI, S.H.







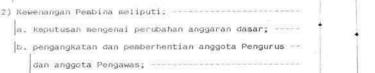
ayat (7); ----







- Pasal 10 (1) Rapat Pembina diadakan paling sedikit dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan ---setelah akhir tahun buku sebagai rapat tahunan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 12. -Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorangatau lebih anggota Pembina, anggota Pengurus, atau -anggota Pengawas. --
- (2) Panggilan rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda -terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat -diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal ----panggilan dan tanggal rapat. ---
- (3) Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
- (4) Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan, atau di tempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.
- (5) Dalam hai semua anggota Pembina hadir, atau diwakilipanggilan tersebut tidak disyaratkan dan rapat Pembina dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
- (6) Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika -Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka ---rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang di ---pilih oleh dan dari angota Pembina yang hadir.
- (7) Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili cleh --anggota Pembina lainnya dalam rapat Pembina -----



(3) Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka --segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya. --

rdasarkan surat kuasa.

perdasarkan surat Kuasa. Pasal 11 (1) Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil ----keputusan yang mengikat apabila: ----a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -jumlah anggota Pembina; ----dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --(1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -emanggilan rapat Pembina Kedua; ----c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -(1) hurut b. harus dilakukan paling lambat 7 -----(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----tanggal rapat; d. rapat Pembina kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh atu) hari terhitung sejak rapat Pembina pertama:e. rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak ----mengambil keputusan yang mengikat, apabila di ---hadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah ----anggota Pembina. (2) Keputusan rapat Pembina diambil berdasarkan -----musyawarah untuk mufakat. (3) Dalam hai Keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---mutakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --dua) jumlah suara yang sah. (4) Dalam hai suara setuju dan tidak setuju sama ----banyaknya, maka usul ditolak. (5) Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:



- c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidakdihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
- (6) Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan Sekretaris rapat.

 (7) Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris.
- (8) Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dansemua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
- (9) Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat
- (10) Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka diadapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat.





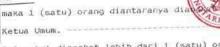
RAPAT TAHUNAN

Š	Pasal 12
(1) [embina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap -
1	tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun
li	ouku Yayasan ditutup.
(2)	Dalam rapat tahunan. Pembina melakukan:
1	a. evaluasi tentang harta Kekayaan, hak dan kewajiban
	Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar
	pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan-
	Yayasan untuk tahun yang akan datang;
1	b. pengesahan laporan tahunan yang diajukan Pengurus;
ĵ.	c. penetapan kebijakan umum Yayasan;
Ĭ.	d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran
- 8	tahunan Yayasan.
Sec. of	Pengesahan laporan tahunan oleh Pembina dalam rapat -
	tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan-
1	tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota
	Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan pengawasan-
	yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu,
	sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan
	tahunan.
,	P E N G U R U S
	Pasal 13
(1)	Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan
	kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri-
	dari:
	a. secrang Ketua;
1	b. seorang Sekretaris; dan
- 0.0	CIPT CONSEQUENCE IN THE SECURITION OF STREET

c. seorang Bendahara;

(2) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, -





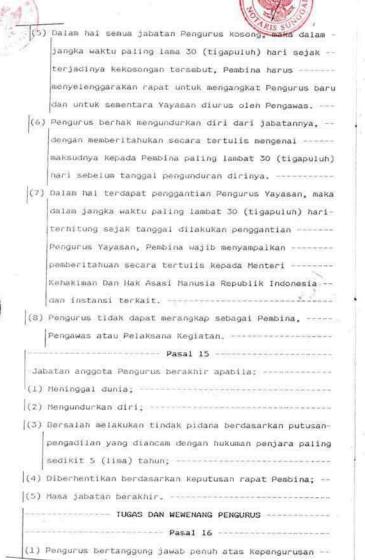
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang
 Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkatsebagai Sekretaris Umum.
- (4) Dalam hal diangkat lebih dari i (satu) orang

 Bendahara, maka i (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.

--- Pasal 14 ----

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan pukum tetan.
- (2) Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembinauntuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
- - Pendiri, Pembina dan Pengawas; dan
 b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsungdan penuh.
- (4) Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangkawaktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan warapat untuk mengisi kekosongan itu.





KARTOR HOTATIS
ERLENI, S.C.

a. Sei Mandrim Ma. 12-4 Kg. Lifta-S.
Telta. (051) 8447121 Kartus ATTA Pro-si

Yayasan untuk kepentingan tujuan.

(2) Pengurus wajib menyusun program kerja dan-rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.

berikut: --

(3) Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.

(4) Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik danpenuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan --mengindahkan peraturan perundang undangan yang ---berlaku.

(5) Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai-

a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan -(tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Gank); -

c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;
d. membeli atau dengan cara iain mendapatkan/

memperoleh harta tetap atas nama Yayasan,

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;

t. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang teratiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus danatau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermantaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

(6) Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5)-



huruf a, b, c, d, e dan f harus mendabat persetujuandari Pembina.

Pasal 17

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:

(1) Mengikat Yayasan sebagai penjamin hutang;

(2) Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain;

(3) Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.

Pasal 18



- (1) Ketua Umum bersama-sama dengan salah sebrang anggota-Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atasnama Pengurus serta mewakili Yayasan.
- (3) Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugasdan wawenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.

ERLENI, S.F.

(4) Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka
segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada
Sekretaris Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan,
dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara
Umum berlaku juga baginya.

(6) Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurusditetapkan oleh Pembina melalui rapat Pembina.

(7) Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan
surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

(1) Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan



(2) Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan

Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan ----

Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pallit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan

tersebut berkekuatan hukum tetap.

(3) Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus --berdasarkan keputusan rapat Pengurus untuk jangka --waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali ----dengan tidak mengurangi keputusan rapat Pengurus ----

(1) Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara -----Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila -----kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---nama Pengurus serta mawakili Yayasan. -----(2) Dalam hal Yayasan mempunyai Kepentingan yang --- RAPAT PENGURUS -----

untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

(4) Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada -

(5) Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, atau-

Keputusan rapat Pengurus. ---- Pasal 20 -----

honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan ----



- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus -yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka ----anggota Pengurus lainnya bertindak untuk dan atas ---
- bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, --maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

----- Pasal 21 -----

- (1) Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila ----dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu -orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina. --
- (2) Panggilan rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus. -----
- (3) Panggilan rapat Pengurus disampaikan kepada setiap -anggota Pengurus secara langsung, atau melalui suratdengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak ----memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-

ERLENI, S.H.

(4) Penggilan rapat Pengurus itu harus men tanggal, waktu, tempat dan acara rapet. --(5) Rapat Pengurus diadakan ditempat kedudukan Yayasan -atau ditempat kegiatan Yayasan. (6) Rapat Pengurus dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina. ----- Pasal 22 (1) Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum. ---(2) Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -Pengurus yang hadir. (3) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam rapat Pengurus berdasarkan --surat kuasa. -----(4) Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan --yang mengikat apabila: a. dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -jumlah Pengurus. b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat --(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -pemanggilan rapat Pengurus kedua. c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat -(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan

tidak mempernitungkan tanggal panggilan dan -----

d. rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat- a

10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh

tanggal rapat.



satu) hari terhitung sejak rapat Pengurus pertama e. rapat Pengurus Kedua sah dan berhak mengambil ----Keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih -dari 1/2 (satu per dua) jumlah Pengurus. Pasal 23 -----(1) Keputusan rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ------(2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk ---mutakat tidak tercapai, maka keputusan diambil ----berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per --dua) jumlah suara yang sah. ----(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -----banyaknya, maka usul ditolak. -(4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan-dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada Keberatan dari yang hadir. -----(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----(6) Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yangditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang -- ERLENI, S.F

mengenai usul yang diajukan secara terb menandatangani persetujuan tersebut.

(9) Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Pengurus.

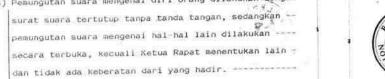
PENGAWAS

Pasal 24

- (1) Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalammenjalankan kegiatan Yayasan. -----
- (2) Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih ----anggota Pengawas.
- (3) Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas. -----

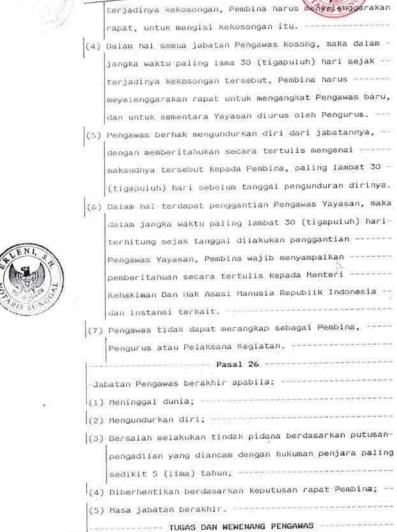
----- Pasal 25 ---

- (1) Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan --hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi ---Yayasan, masyarakat atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ----terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan-
- (2) Pengawas diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembinauntuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkatkembali. ---
- (3) Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangkawaktu paling lama 30 (tigapuluh) hari sejak ----



- anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --sebagai Sekretaris rapat.
- (7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat denganakta Notaris. ----
- (8) Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah ---tanpa mengadakan rapat Pengurus, dengan ketentuan --semua anggota Pengurus memberikan persetujuan ------

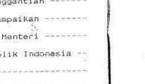




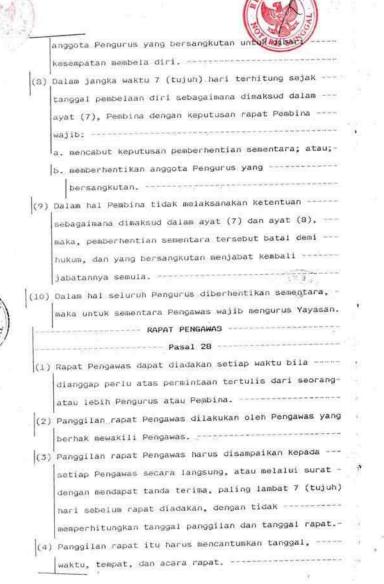


(1) Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab menjalankan tugas pengawasan untuk kepentingan-Yayasan. -----(2) Ketua Pengawas dan anggota Pengawas berwenang ----bertindak untuk dan atas nama Pengawas. ----(3) Pengawas berwenang:

- a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yangdipergunakan Yayasan;
- b. memeriksa dokumen; ---c. memeriksa pembukuan dan mencocokkanya dengan uangkas atau; -----
- d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus; -----
- e. memberi peringatan kepada Pengurus. --
- (4) Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 ---(satu) orang atau lebih Pengurus, apabila anggota --Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan ----anggaran dasar dan atau peraturan perundang undanganyang berlaku. ----
- (5) Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan ----secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai --alasannya. --
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak -tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada --Pembina.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak --tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana --dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil









- atau tempat kegiatan Yayasan.

 (6) Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan -Pembina.

 Pasal 29

 (1) Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.
- (3) Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh ---Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan --surat kuasa.
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat -(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan -pemanggilan rapat Pengawas kedua;
- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) -huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) -hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak -memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal --rapat:
- d. rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari dari terhitung sejak rapat Pengawas ---

e. rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak ----mengambil keputusan yang mengikat, apabila ----dinadiri oleh paling sedikit 1/2 (satu per dua) -jumlah Pengawas.

(1) Keputusan rapat Pengawas harus diambil berdasarkan -musyawarah untuk mufakat.

(3) Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama -------banyaknya, maka usul ditolak.

(4) Pemungutan suara mengenai diri orang yang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan,
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal fain
dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat
menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang

(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang
dikeluarkan.

(6) Setiap rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yangditandatangani oleh Ketua rapat dan 1 (satu) orang -anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat --sebagai Sekretaris rapat.

(7) Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak -disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat denganakta Notaris.

(8) Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah ----

tanpa mengadakan rapat Pengawas, dengan ketentuan -semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan
semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul
yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani
usul tersebut.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

(1) Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh -----Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.

(2) Rapat gabungan diadakan paling lambat 30 (tigapuluh)hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai

(3) Panggilan rapat gabungan dilakukan oleh Pengurus. ---

(4) Panggilan rapat gabungan disampaikan kepada setiap -Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui -surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 -(tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak --memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.

(5) Panggilan rapat gabungan harus mencantumkan tanggal,waktu, tempat, dan acara rapat.

(6) Rapat gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan -- atau ditempat kegiatan Yayasan.

(7) Rapat gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.

(8) Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan - hadir, maka rapat gabungan dipimpin oleh Ketua -----





(3) Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat gabungan dipimpinoleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan --dari Pengurus dan Pengawas yang hadir. Pasal 32 -----(1) Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh ----Pengurus lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan -surat kuasa. (2) Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh -----Pengawas lainnya dalam rapat gabungan berdasarkan --surat kuasa. ----(3) Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak ----mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) --suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. (4) Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan -pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan ---secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. ------(5) Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dinggap tidak ada. KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN ----Pasal 33 ----(1) a. Rapat gabungan adalah sah dan berhak mengambil ---Keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling -sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota ---Pengurus dan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah ----anggota Pengawas.



- huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan ----pemanggilan rapat gabungan kedua.
- c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
 (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7

 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan -----tanggal rapat.
- d. Rapat gabungan kedua diselenggarakan paling cepat10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak rapat gabungan pertama.
- e. Rapat gabungan kedua adalah sah dan berhak

 mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri

 paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari jumlah

 anggota Pengurus dan 1/2 (satu per dua) dari

 jumlah anggota Pengawas.
- (2) Keputusan rapat gabungan sebagaimana tersebut diatasditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. ----
- (4) Setiap rapat gabungan dibuat berita acara rapat, yang
 untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota --Pengawas yang ditunjuk oleh rapat.
- (5) Berita acara rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat -(4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak
 ketiga tentang Keputusan dan segala sesuatu yang





laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai; --b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisikeuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, -laporan arus kas dan catatan laporan Keuangan. ---(3) Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus -dan Pengawas. (4) Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas -yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis. (5) Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat --tahunan. (6) IKhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai ---dengan standar akuntansi kewangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan. --Bagi Yayasan yang memperoleh bantuan negara, bantuanluar negeri atau pihak lain sebesar Rp.500.000.000,-(limaratus juta rupiah) atau lebih, atau yang ---mempunyai kekayaan diluar wakat sebesar Rp.20.000.000.000,- (duapuluh milyar rupiah) atau --lebih, ikhtisar laporan tahunan Yayasan wajib diaudit oleh akuntan publik dan diumumkan dalam surat kabar berbahasa Indonesia. PERUBAHAN ANGGARAN DASAR Pasal 36 (1) Perubahan anggaran dasar hanya dapat dilaksanakan --berdasarkan keputusan rapat Pembina, yang dihadiri -paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina. -----

(2) Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk -----

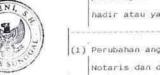




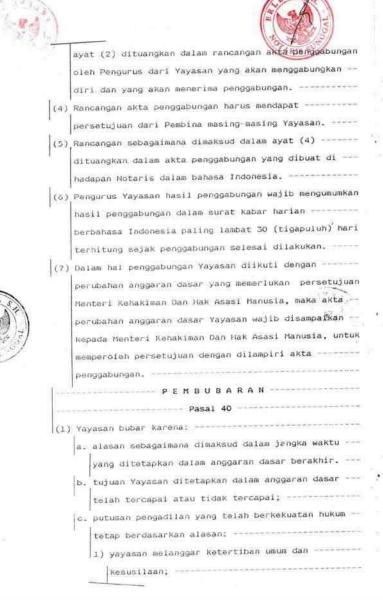
(3) Dalam hal keputusan secara musyawarah untuk mutakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan dengan ---persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari -jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili. -----(4) Dalam hal Korum sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) -tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat -----Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari ----terhitung sejak tanggal rapat Pembina yang pertama. (5) Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri -oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh ----Pembina. (6) Keputusan rapat Pembina Kedua sah, apabila diambil -persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yanghadir atau yang diwakili. --(1) Perubahan anggaran dasar dilakukan dengan akta -----Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. (2) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan ----terhadap maksud dan tujuan Yayasan. ----(3) Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan -nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (4) Perubahan anggaran dasar selain yang menyangkut hai hal sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) cukup -diberitahukan kepada Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi-Manusia Republik Indonesia. (5) Perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ------

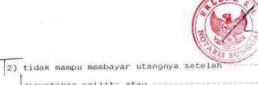


	persetujuan kurator.
-	P E N G G A B U N G A N
	Pasal 38
(1	Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan
	menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan
	Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang
v	menggabungkan diri menjadi bubar.
(2	Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat-
	(1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
	a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan
	tanpa dukungan Yayasan lain;
	b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang
	bergabung kegiatannya sejenis; atau
	c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah
	melakukan perbuatan yang bertentangan dengan
	anggaran dasarnya, ketertiban umum dan
7(0)	Kesusilaan.
(3)	Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh
	Pengurus Kepada Pembina.
	Pasal 39
(1)	Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan
	berdasarkan keputusan rapat Pembina yang dihadiri
	oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah-
	anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4
₩.	(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina-
1.	yang hadir.
(2)	Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan
	menggabungkan diri dan yang akan menerima
y	penggabungan menyusun usul rencana penggabungan
(3)	Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam-



mutakat.





- dinyatakan pailit; atau
- harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk
 melunasi utangnya setelah pernyataan pailit
 dicabut.
- (2) Dalam hai Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat
 (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk likuidatoruntuk membereskan kekayaan Yayasan.
- (3) Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus -bertindak sebagai likuidator.

----- Pasal 41 -

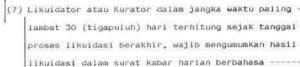
- (1) Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat
 melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskankekayaannya dalam proses likuidasi.
- (2) Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ---untuk semua surat keluar dicantumkan frasa "dalam ---likuidasi" di belakang nama Yayasan.
- (3) Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan, maka pengadilan juga menunjuk likuidator.
- (4) Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan. --
- (5) Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan.

 pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, --kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan
 terdapat Pengurus, berlaku juga bagi likuidator. ---



THE STATE OF THE S





Indonesia.

harian berbahasa Indonesia. -

(8) Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling --lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proseslikuidasi berakhir, wajib melaporkan pembubaran ---Yayasan Kepada Pembina.

(9) Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan ----sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil -likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak -----dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi --

-- Pasal 42 -----

(1) Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada ----Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang -sama dengan Yayasan yang bubar. -----

(2) Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud -dalam ayat (1) dapat diserahkan kepada badan hukum -lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan
yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam UndangUndang yang berlaku bagi badan hukum tersebut. -----

(3) Dalam hal kekayaan sisa likuidasi tidak diserahkan -kepada Yayasan lain atau kepada badan hukum lain ---sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), --kekayaan tersebut diserahkan kepada negara dan ----penggunannya dilakukan sesuai dengan maksud dan -----





tujuan Yayasan yang bubar. PERATURAN PENUTUP Pasal 43 (1) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam --anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat (2) Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 ayat (4), --pasal 13 ayat (1), dan pasal 24 ayat (1) anggaran --dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susuman Pembina, Pengurus, dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut: ---a. Pembina : Tuan TURUT, Lahir di Medan Krio, pada tanggal 07-07-1958 (tujuh Juli seribu sembilanratus limapuluh delapan). --Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan Krio, Kabupaten Deli Serdang, pemegang Nomor Induk Kependudukan:1207230707580003. ---b. Pengurus : Tuan HARI SUSANTO, lahir di Medan ---Ketua Krio, pada tanggal 30-09-1989 (tiga

: Tuan HARI SUSANTO, lahir di Medan --Krio, pada tanggal 30-09-1989 (tiga -puluh September seribu sembilanratusdelapanpuluh sembilan), Warga NegaraIndonesia, Wiraswasta, bertempat --tinggal di Sunggal, Dusun III Desa -Hedan Krio, Kabupaten Deli serdang, -pemegang Nomor Induk Kependudukan: -0201123009890011.



Sekretaris : Nyonya NANING SARTIKA, Sarjan

Ekonomi, lahir di Medan Krio, pada tanggal 08-06-1984 (delapan Juni ---seribu sembilanratus delapanpuluh --empat), Warga Negara Indonesia, ----Perangkat Desa, bertempat tinggal di-Sunggal, Dusun III Jalan Bengawan ---Desa Medan Krio, Kabupaten Deli ----Serdang, Kecamatan Medan, pemegang --Nomor Induk Kependudukan -----:1207234806840009. -----

Bendahara : Nyonya RUSMAYANI, lahir di Medan ----Krio, pada tanggal 12-05-1980 (dua -belas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh), Warga Negara - (4) Indonesia, Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun III Desa Medan Krio, Kabupaten Deli -Serdang, pemegang Nomor Induk -----Kependudukan:1207235205800007. -----

c. Pengawas

:|Tuan RUSLI, Doktorandus, lahir di Sei Mencirim, pada tanggal 17-08-1966 ---(tujunbelas Agustus seribu sembilan ratus enampuluh enam), Warga Negara -Indonesia, Guru, bertempat tinggal di Sunggal, Dusun II Jalan Jati Desa Sei dencirim, Kabupaten Deli Serdang, --pemegang Nomor Induk Kependudukan: --1207231706660004. -----

(3) Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota -----



Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima oleh masing-masing yang persangkutan dan harus disahkan dalam rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah akta pendirian ini --mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi -yang berwenang. Pengurus Yayasan dan

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain --dikuasakan untuk mengajukan permohonan pengesahan dan atau pendaftaran atas anggaran dasar ini kepada ---instansi yang berwenang dan untuk membuat pengubahandan atau tambahan dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk memperoleh pengesahan tersebutdan untuk mengajukan serta menandatangani semua ---permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempatkedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang mungkin diperlukan.

- DEMIKIANLAH AKTA INI

Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Sunggal. --pada hari, tanggal dan waktu seperti tersebut diatas, -dengan dihadiri oleh Nyonya DEWI RAHAYU, tahir di Medan, pada tanggal 10-10-1986 (sepuluh Oktober seribu -----sembilanratus delapanpuluh enam), bertempat tinggal di -Medan, Lingkungan Pinang Baris I-A. Kelurahan Lalang, -Kecamatan Medan Sunggal dan Tuan MUFLIH MAYDIKA PUTRA, lahir di Medan Krio, pada tanggal 27-05-1990 (duapuluh tujuh Mei seribu sembilanratus sembilanpuluh), bertempat







Sunggal, 12-7-2013.-



Forncopy ini sesuni dengan salinya telah diperlihatkan kepada saya, ERLENA, Sarjana tiukum. Notaris di Sanggal, Kabupaten Deli Serdang.

ENI, SH.

Ŧ